

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penulisan dan analisis sebagaimana telah diuraikan diatas maka penulis mencoba mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum dan pemulihan terhadap korban tindak pidana perdagangan anak adalah :
 - a. Korban diamankan terlebih dahulu dirumah perlindungan
 - b. KPAI bekerja sama dengan advokat dalam memberikan bantuan hukum terhadap korban perdagangan anak
 - c. KPAI mengupayakan tuntutan restitusi (ganti kerugian) kepada pelaku sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak korban perdagangan anak.
 - d. Pembinaan mental terhadap korban perdagangan anak.
 - e. Mengusahakan apa yang diinginkan korban itu dipenuhi dengan batasan tertentu misalnya belajar salon, belajar menjahit atau bersekolah kembali.
 - f. Melakukan rehabilitasi untuk memulihkan trauma korban perdagangan anak.
 - g. Korban dikembalikan kepada keluarganya.

2. Hambatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum dan pemulihan terhadap korban perdagangan anak ada beberapa hal, yaitu :

- a. Tidak adanya ketegasan dan keberanian dari aparat penegak hukum dalam memberikan sanksi hukum pidana yang berat terhadap pelaku.
- b. Adanya ancaman dan intimidasi yang diperoleh KPAI dalam menjalankan tugasnya.
- c. Dalam hal pelaksanaan tugas KPAI dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak tidak berjalan dengan efektif, hal ini diakibatkan kurangnya fungsi monitoring antara KPAI dengan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaku tempat pendataan orang-orang yang ingin berkerja, Departement Sosial selaku tempat pendataan anak-anak yang terlantar serta Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan anak dengan tujuan yang sama yaitu demi kepentingan terbaik untuk anak.

B. Saran

Beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai saran sehubungan dengan hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Berpegang pada tujuan penyelenggaraan perlindungan anak, maka perlindungan anak harus diarahkan pada upaya pengkondisian anak-

anak pada dua aspek penting, yaitu; pertama, pemenuhan seluruh hak-hak anak tanpa terkecuali; kedua, perlindungan anak-anak dari perbuatan pidana terutama kekerasan dan diskriminasi.

2. Untuk melindungi hak-hak anak khususnya korban perdagangan anak maka KPAI perlu melakukan fungsi monitoring dan kerjasama terhadap DEPNAKERTRANS selaku tempat pendataan orang-orang yang ingin berkerja, Departement Sosial selaku tempat pendataan anak-anak yang terlantar serta Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan anak dengan tujuan yang sama yaitu demi kepentingan terbaik untuk anak.
3. KPAI dan aparat penegak hukum harus berani dalam memberantas perdagangan anak di Indonesia.
4. Jaksa seharusnya memasukkan tuntutan restitusi/ganti kerugian didalam melakukan penuntutan kepada sebagai bentuk keadilan dan perlindungan terhadap korban perdagangan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Sulistiyowati Irianto, Lim Sing Meij, Firliana Purwanti, Luki Widiastuti, 2007, *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta,
- Ruth Rosenberg, editor, 2003, *Perdagangan perempuan Dan Anak Di Indonesia*, Internasional Chatolic migration Commision dan American Center for International Labor Solidarity, Jakarta.
- UNICEF, 2003, *Pedoman Untuk Perlindungan Hak-Hak Anak Korban Perdagangan Manusia*, UNICEF.
- Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- HAM Dalam Praktek, 2000, *Panduan Melawan Perdagangan Perempuan dan Anak*, Lembaga Advokasi Buruh Migran Indonesia Solidaritas Perempuan, Jakarta
- Philipus M. Hadjo, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Drs. Didik M.Syarif Mansur, S.H.,M.H dan Elisatris Gultom, S.H.,M.H, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Muladi, 2003, *HAM Dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, dalam : Muladi (ed), *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung.
- Dra. Farhana, S.H.,M.H.,M.Pdi, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cet.kelima, Jakarta, Raja Grafindo persada.
- Rachmad Syafaat, 2003, *Dagang Manusia*, cet. 1, Jakarta, Lappera Pustaka Utama.
- Departemen Kehakiman AS, 2008, Kantor Pengembangan, Asisten dan Pelatihan Kerja Sama Luar Negeri (OPDAT) dan Kantor Kejaksaan RI (Pusdiklat),

Perdagangan Manusia dan Undang-Undang Ketenagakerjaan: Strategi Penuntutan yang Efektif.

Dr.Alwi Shihab, 2005, Penghapusan Perdagangan Orang (Trafficking In Person) di Indonesia tahun 2004-2005 Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Jakarta.

Makalah

Rheny Wahyuni Pulungan, “*Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Perempuan dan Anak*”, Makalah, Disampaikan dalam Semiloka Strategi Penanggulangan kejahatan Lintas Batas, Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, Pontianak, tanggal 5-6 Oktober 2004.

IOM dan NZAID, Pedoman untuk Penyidikan dan Penuntutan Tindak pidana Trafficking dan perlindungan terhadap Korban Selama Proses Penegakan Hukum, 2005

Internet

http://www.ham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=580:trafficking-in-person-kasus-pelanggaran-ham&Itemid=151

<http://www.ajrcaceh.org/file/Copy%20of%20Trafficking%20Perempuan%20dan%20anak%20jurnal.pdf>

http://www.menkokesra.go.id/pdf/deputi3/human_trafficking_ind.pdf

<http://www.lfip.org/report/trafficking%20data%20in%20Indonesia%20table.pdf>

www.kpai.go.id

www.liapadma.wordpress.com/tag/kpai/

[www.usembassyjakarta.org/bhs/laporan/laporan-tip-indo2,Departement Luar Negeri AS, laporan mengenai perdagangan manusia \(bagian ke-II \).](http://www.usembassyjakarta.org/bhs/laporan/laporan-tip-indo2,Departement%20Luar%20Negeri%20AS,%20laporan%20mengenai%20perdagangan%20manusia%20(bagian%20ke-II))

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:2A5wbfMvItcJ:depusa.student.umm.ac.id/+upaya+pemulihan+korban+perdagangan+anak&cd=17&hl=id&ct=clnk&gl=id>

<http://www.komnaspaspa.or.id/pdf/Buku%20Masalah%20Anak%20Sepanjang%20Tahun%202005.pdf>.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Diterjemahkan oleh Moeljatno

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO 182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan Dan Anak

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia



KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

Jl. Teuku Umar No.10 – 12 Jakarta Pusat 10350 Telp. 021-31901446, 31900659
Fax. 021-3900833. Hotline Service. 021-31901556

Nomor : 149/Sekrt/KPAI/IV/2011
Perihal : Surat Keterangan
Kepada : Yth. Harum Pujiyanto, SH, M.Hum
Di –
Tempat

Jakarta, 19 April 2011

Dengan Hormat,

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **ROIHOT LUMBAN TOBING**
Nomor Pokok Mahasiswa : 050509253
Semester / Tahun Angkatan : 12 / 2005
Fakultas : Hukum
Universitas : Atmajaya Yogyakarta

Telah melakukan Research/Penelitian, wawancara di lingkungan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam rangka Penyusunan Skripsi yang berjudul “Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam memberikan Perlindungan Hukum dan Pemulihan Terhadap Korban Perdagangan Anak di Indonesia”.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Kepala Bagian Data dan Pelaporan



Drs. M. Nasir Yusuf